

BAB I

PENDAHULUAN

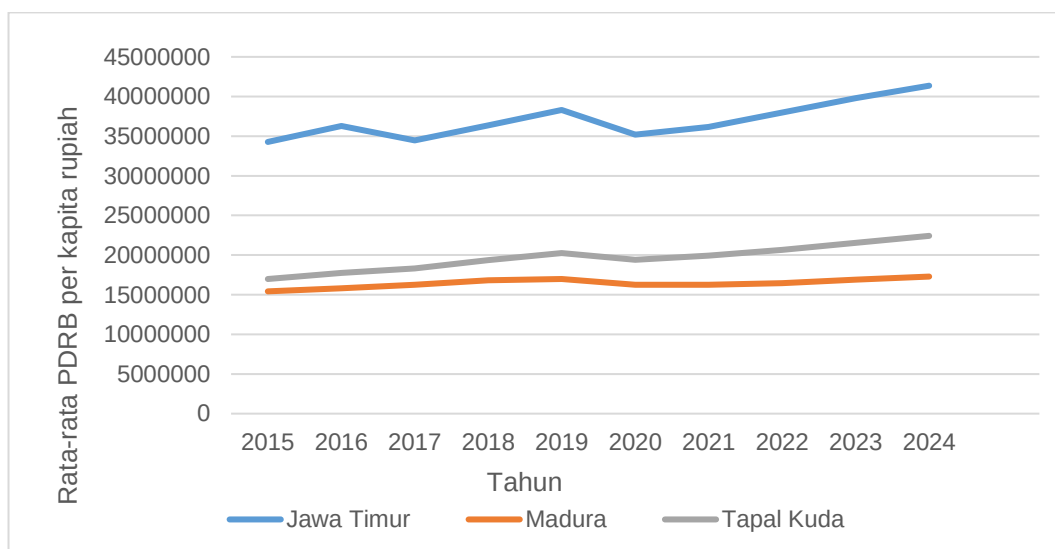
1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan daerah karena kesejahteraan mencerminkan kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan hidup secara layak (Capecchi et al., 2025; Prihastari et al., 2024). Salah satu indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang mencerminkan tiga dimensi dasar kesejahteraan, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui angka harapan hidup, pengetahuan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita. IPM dipandang mampu menggambarkan hasil pembangunan secara lebih komprehensif dibandingkan indikator ekonomi tunggal seperti pendapatan per kapita (UNDP, 2022). Oleh karena itu, IPM sering digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian kesejahteraan karena mampu menangkap aspek ekonomi dan sosial secara simultan.

Selain IPM, pendapatan per kapita atau PDRB per kapita juga digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pendekatan ekonomi makro. Pendapatan per kapita mencerminkan rata-rata kemampuan ekonomi penduduk dalam suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar peluang masyarakat untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan (Todaro & Smith, 2020). Peneliti sering menggunakan PDRB per kapita sebagai indikator

kesejahteraan ekonomi karena ukuran ini menggambarkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang diterima penduduk di suatu wilayah. Namun, peningkatan PDRB per kapita tidak selalu terjadi merata antarwilayah karena perbedaan struktur ekonomi, kualitas tenaga kerja, dan akses layanan dasar.

Perbedaan nilai PDRB per kapita antar daerah mencerminkan tingkat ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang berbeda, perbedaan kesejahteraan ini juga terjadi antara Wilayah Madura dan Tapal Kuda yang merupakan kawasan strategis di Provinsi Jawa Timur yang mana keduanya memiliki Hal ini juga karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Tetapi memiliki kesamaan suku, budaya, dan pola hidup yang sama.



Gambar 1.1 PRDB per kapita Jawa Timur, Madura, dan Tapal Kuda 2015-2024

Berdasarkan data PDRB per kapita tahun 2015–2024, terlihat adanya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antara Provinsi Jawa Timur, wilayah Madura, dan wilayah Tapal Kuda. Secara umum, PDRB per kapita Jawa Timur selalu berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kedua kawasan tersebut sepanjang periode penelitian. Akan tetapi Wilayah Tapal Kuda pada penelitian ini mencakup Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan

Jember pada penelitian ini beberapa kab/kot di wilayah tapal kuda tidak di masukkan seperti Kab Banyuwangi, Kab Pasuruan, dan Kota Probolinggo dikarenakan memiliki PDRB yang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di wilayah Tapal Kuda meskipun begitu PDRB per kapita wilayah Tapal Kuda masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Madura yang mencakup Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pada tahun 2015, PDRB per kapita Jawa Timur sebesar 34.272.300 rupiah, sementara Madura sebesar 15.425.460 rupiah dan Tapal Kuda sebesar 16.980.482 rupiah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan, di mana PDRB per kapita Jawa Timur hampir dua kali lipat dibandingkan Madura. Tapal Kuda berada di posisi menengah, lebih tinggi dari Madura namun masih jauh di bawah rata-rata provinsi. Secara tren, PDRB per kapita Jawa Timur mengalami peningkatan dari 34.272.300 rupiah pada tahun 2015 menjadi 41.363.500 rupiah pada tahun 2024. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 dan terutama tahun 2020 (35.196.000 rupiah), yang kemungkinan berkaitan dengan perlambatan ekonomi, nilai tersebut kembali meningkat secara konsisten hingga tahun 2024. Wilayah Madura menunjukkan tren peningkatan yang lebih lambat. PDRB per kapita meningkat dari 15.425.460 rupiah pada tahun 2015 menjadi 17.286.500 rupiah pada tahun 2024. Namun, pertumbuhannya relatif moderat dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Dibandingkan dengan Jawa Timur dan Tapal Kuda, tingkat PDRB per kapita Madura secara konsisten menjadi yang terendah, yang mengindikasikan kapasitas ekonomi masyarakat yang relatif lebih terbatas. Sementara itu, Tapal Kuda menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan Madura. PDRB per kapita meningkat dari 16.980.482 rupiah pada tahun 2015 menjadi 22.422.400 rupiah pada tahun 2024. Selisih antara Tapal

Kuda dan Madura cenderung melebar dari tahun ke tahun, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi per kapita di Tapal Kuda berlangsung lebih cepat. Bahkan, pada periode 2021–2024, kenaikan PDRB per kapita Tapal Kuda terlihat cukup signifikan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan PDRB per kapita antara Jawa Timur dengan kedua wilayah penelitian, serta antara Madura dan Tapal Kuda. Perbedaan ini mencerminkan adanya disparitas pembangunan ekonomi antara wilayah Tapal kuda dan Madura. Kondisi kesejahteraan yang berbeda ini memerlukan analisis dan investigasi yang lebih mendalam.

Dalam Literatur internasional menjelaskan bahwa variasi kesejahteraan berbasis pendapatan per kapita sangat terkait dengan kondisi pasar kerja, kemiskinan, dan produktivitas (Boumahdi & Zaoujal, 2023; Oehler-Şincal, 2023; Sebastian, 2022). Pengangguran (TPT) menurunkan output karena tenaga kerja tidak terserap dalam proses produksi; hubungan negatif antara pengangguran dan output juga tercermin kuat dalam pembuktian Okun's Law di banyak negara (Furceri et al., 2020). Selain itu, kemiskinan menghambat peningkatan pendapatan per kapita karena rumah tangga miskin menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja produktif. Bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung menurunkan kemiskinan, tetapi dampaknya bergantung pada dinamika distribusi dan ketimpangan (Bao & Liao, 2024).

Kebijakan pasar tenaga kerja seperti upah minimum juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan melalui saluran daya beli dan permintaan agregat. Namun, dampaknya terhadap kesempatan kerja tidak selalu seragam di negara berkembang. Studi survei dan meta-analisis pada negara berkembang

menunjukkan bahwa efek upah minimum terhadap pekerjaan bervariasi lintas konteks dan desain kebijakan, sehingga perlu diuji pada karakter wilayah yang spesifik (Pratomo, 2016). Dengan demikian, kombinasi indikator makro—TPT, kemiskinan, dan upah minimum menjadi dasar yang kuat untuk menjelaskan perbedaan PDRB per kapita antarwilayah.

Selain faktor makro, studi pertumbuhan ekonomi menempatkan modal manusia sebagai penentu penting kesejahteraan jangka menengah–panjang. Pendidikan meningkatkan produktivitas karena memperkuat keterampilan dan kemampuan adaptasi tenaga kerja; basis data capaian pendidikan lintas negara juga banyak dipakai untuk menjelaskan perbedaan output dan pendapatan per kapita (Varona & Gonzales, 2025). Dalam penelitian ini, pendidikan diproksi melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) agar analisis menangkap tingkat keterlibatan penduduk usia sekolah dalam sistem pendidikan. Sementara itu, kesehatan yang diproksi oleh Umur Harapan Hidup (UHH) memengaruhi produktivitas dan kapasitas kerja; bukti menunjukkan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap output agregat dalam pendekatan fungsi produksi (Hasibuan et al., 2023). Meski demikian, beberapa studi juga menekankan bahwa hubungan harapan hidup dan pendapatan per kapita dapat berbeda antarwilayah karena faktor demografi dan struktur ekonomi, sehingga pengujian berbasis konteks tetap penting (Rotova, 2020).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kualitas tingkat pengangguran, angka kemiskinan, upah minimum, pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu determinan kesejahteraan masyarakat. Prasetyo dan Zuhdi (2023) membuktikan bahwa peningkatan IPM mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan sedangkan Supit et al. (2023) menemukan bahwa tingginya

pengangguran memperburuk kondisi kesejahteraan melalui peningkatan kemiskinan. Pada penelitian Gunawan (2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia di Pulau Madura, sedangkan tingkat kemiskinan dan pengangguran masih menjadi faktor yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya berfokus pada kabupaten-kabupaten di Pulau Madura sehingga hasilnya belum dapat menjelaskan apakah pola hubungan tersebut juga berlaku pada wilayah lain di Jawa Timur yang memiliki karakteristik berbeda. Pada penelitian Setyowati dan Solihin (2024), menemukan bahwa efisiensi belanja pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tapal Kuda. Sementara itu, penelitian Hidayatullah dkk. (2020) menunjukkan bahwa peningkatan PDRB dan IPM mampu menurunkan tingkat kemiskinan di kawasan tersebut..

Perbedaan pada penelitian sebelumnya penelitian ini menggabungkan variabel-variabel independent pada PDRB per kapita Madura, PDRB per kapita Tapal Kuda. Walaupun hubungan antara pengangguran, kemiskinan, upah minimum, pendidikan, dan kesehatan dengan kesejahteraan telah banyak dibahas, masih terdapat celah penelitian pada konteks kajian ini. Pertama, kajian empiris sering menguji variabel-variabel tersebut secara parsial atau pada satu wilayah, padahal determinan kesejahteraan dapat bekerja secara simultan. Kedua, studi yang secara eksplisit membandingkan wilayah Madura dan Tapal Kuda dalam satu kerangka model yang sama masih terbatas, padahal keduanya memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dan ditunjukkan pula oleh perbedaan pola PDRB per kapita pada periode 2015–2024.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase angka kemiskinan, upah minimum, Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai indikator pendidikan, dan Umur Harapan Hidup (UHH) sebagai indikator kesehatan terhadap PDRB per kapita, pada wilayah Madura dan Tapal Kuda dengan menggunakan regresi data panel. Penelitian ini memilih data panel karena metode ini memungkinkan peneliti menangkap variasi antarwilayah dan perubahan antarwaktu secara lebih akurat, sekaligus mengendalikan karakteristik daerah yang tidak teramati tetapi relatif tetap.

Secara teoritis, penelitian ini mengajukan dugaan bahwa TPT dan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap PDRB per kapita karena peningkatan pengangguran mengurangi pemanfaatan tenaga kerja produktif, sedangkan tingginya kemiskinan membatasi daya beli dan menurunkan kemampuan rumah tangga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, penelitian ini menduga upah minimum, APS, dan UHH berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita karena kebijakan upah minimum berpotensi meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat, sementara peningkatan partisipasi sekolah dan kesehatan penduduk memperkuat produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini juga memperkirakan adanya perbedaan besaran koefisien antarwilayah karena Madura dan Tapal Kuda memiliki struktur ekonomi, karakteristik pasar kerja, serta kualitas modal manusia yang tidak sama. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan masukan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam upaya menurunkan pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sehingga pemerintah daerah dapat mempersempit kesenjangan kesejahteraan antara Madura dan Tapal Kuda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, upah minimum kabupaten/kota, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Umur Harapan Hidup (UHH) berpengaruh terhadap PDRB per kapita di wilayah Madura?
2. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, upah minimum kabupaten/kota, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Umur Harapan Hidup (UHH) berpengaruh terhadap PDRB per kapita di wilayah Tapal Kuda?
3. Bagaimana kondisi perbedaan kesejahteraan masyarakat di wilayah Madura dan tapal Kuda?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, upah minimum, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Umur Harapan Hidup (UHH) terhadap PDRB per kapita pada kabupaten/kota di wilayah Madura
2. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, upah minimum, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Umur Harapan Hidup (UHH) terhadap PDRB per kapita pada kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda.

3. Menganalisis kondisi perbedaan kesejahteraan masyarakat di wilayah Madura dan Tapal kuda.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi pembangunan dan ekonomi regional, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi PDRB per kapita sebagai proksi kesejahteraan. Penelitian ini juga memperkaya bukti empiris mengenai peran variabel pasar tenaga kerja (TPT), kemiskinan, kebijakan upah minimum, serta modal manusia melalui indikator pendidikan (APS) dan kesehatan (UHH) dalam menjelaskan perbedaan kesejahteraan antarwilayah. Selain itu, penggunaan regresi data panel diharapkan mampu menunjukkan pola hubungan yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan variasi antarwilayah dan antarwaktu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Madura dan Tapal Kuda. Pemerintah dapat menggunakan temuan penelitian sebagai dasar untuk menyusun strategi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja, memperkuat program pengentasan kemiskinan agar lebih efektif, serta mengevaluasi kebijakan upah minimum agar tetap melindungi pekerja tanpa menghambat keberlanjutan usaha. Selain itu, pemerintah juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam memperkuat investasi modal

manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat yang tercermin dari Umur Harapan Hidup (UHH), sehingga peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung lebih merata antarwilayah.

b. Bagi Perencana dan Pengambil Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi dunia usaha dan lembaga terkait untuk memahami kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan daerah, sehingga membantu dalam perencanaan investasi, penyusunan program peningkatan keterampilan, serta dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang meneliti kesejahteraan ekonomi wilayah, khususnya yang menggunakan data panel atau melakukan perbandingan antar kawasan. Peneliti berikutnya juga dapat mengembangkan model dengan menambahkan variabel lain (misalnya struktur sektor ekonomi, investasi, kualitas infrastruktur, atau ketimpangan pendapatan) maupun memperluas cakupan wilayah dan periode penelitian.